

## KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Muhammad Hanri, Ph.D.

muhammad.hanri06@ui.ac.id

Nia Kurnia Sholihah, M.E.

nia.kurnia91@ui.ac.id

### DAFTAR ISI

Ketenagakerjaan – 1

Kemiskinan dan  
Perlindungan Sosial – 2

Program Kerja Paslon dalam  
Konteks Ketenagakerjaan,  
Kemiskinan, dan  
Perlindungan Sosial – 3



*Labor Market Brief* dapat diakses setiap bulan secara gratis dengan memindai kode QR di atas atau melalui tautan: <https://bit.ly/labormarketbrief>

## Menakar Janji Politik Para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

### Ringkasan

Dengan semangat pembaharuan dan harapan yang tinggi, kita menyambut Pemilu 2024 di Indonesia. Pemilu ini tidak hanya penting dalam menentukan arah kepemimpinan nasional untuk lima tahun ke depan, tetapi juga dalam membentuk kebijakan-kebijakan penting, termasuk di sektor ketenagakerjaan yang merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara kita.

Di tengah tantangan global dan perubahan demografis yang dinamis, kesejahteraan sosial, meliputi ketenagakerjaan, kemiskinan, dan perlindungan sosial menjadi topik yang mendesak dan relevan. Meningkatnya jumlah angkatan kerja, kebutuhan akan keterampilan yang berubah seiring kemajuan teknologi, serta isu pengangguran dan ketidaksetaraan menjadi beberapa dari sekian banyak aspek yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan menganalisis visi serta program kerja yang diusung oleh calon-calon presiden terkait dengan topik tersebut. *Labor market brief* edisi ini bertujuan untuk memaparkan beberapa program kerja ketiga pasangan calon presiden yang dapat dirangkum dari beberapa pemberitaan utama.

### Ketenagakerjaan

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengusung visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua". Mereka menargetkan penciptaan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru, termasuk di sektor industri manufaktur, untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45% pada Februari 2023 menjadi antara 3,5% sampai 4,0% pada 2029. Program ini melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta, dan dunia pendidikan untuk memetakan dan menyiapkan kebutuhan tenaga kerja masa depan.

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak menetapkan target khusus dalam penciptaan lapangan kerja. Mereka berjanji untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, meluas di berbagai

sektor, serta memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha. Visi dan misi mereka mencakup berbagai aspek seperti swasembada pangan, energi, dan air, serta penguatan pendidikan, sains dan teknologi.

Sementara itu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menargetkan penciptaan 17 juta lapangan kerja baru. Program ini berfokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja agar semua rakyat cepat mendapatkan pekerjaan, meskipun detail lebih lanjut tentang cara pencapaiannya tidak dijelaskan secara rinci.

### **Kemiskinan dan Perlindungan Sosial**

Adapun pada aspek kemiskinan dan perlindungan sosial, paslon Anies-Muhaimin memiliki delapan misi utama, di mana pengentasan kemiskinan menjadi salah satunya. Mereka berencana menangani kemiskinan dengan strategi yang multifaset, termasuk memperluas kesempatan usaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah yang adil, serta mendukung korporasi lokal untuk sukses di dalam dan luar negeri. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek ekonomi makro dan mikro, mencoba menggabungkan kebijakan ekonomi yang inklusif dengan pemberdayaan masyarakat lokal.

Pada paslon Prabowo-Gibran, pasangan ini juga menekankan pentingnya perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Mereka berencana melanjutkan program bantuan sosial yang sudah ada seperti PKH dan BPNT, yang menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan dukungan langsung kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Pendekatan mereka tampaknya lebih berfokus pada pemberian bantuan langsung kepada masyarakat, khususnya di perdesaan.

Sementara bagi Ganjar-Mahfud, kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi nol persen pada akhir periode jabatan presiden mendatang. Mereka berencana mengatasi kemiskinan dengan mengembangkan perlindungan sosial adaptif dan melakukan konvergensi program pusat dan daerah. Strategi ini menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan sumber daya dan program antara pemerintah pusat dan daerah, yang dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan kemiskinan.

Secara keseluruhan, ketiga pasangan calon menunjukkan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan, meskipun dengan nuansa dan penekanan yang berbeda. Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud menunjukkan kecenderungan untuk menggabungkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan sosial, sedangkan Prabowo-Gibran cenderung lebih fokus pada penguatan program bantuan sosial yang sudah ada. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas dari program-program ini akan sangat bergantung pada implementasi yang baik dan koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan serta stakeholders terkait.

Hingga saat ini, LPEM FEB UI belum menemukan informasi spesifik mengenai program kerja yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dan jaminan kesehatan dari ketiga pasangan calon presiden Indonesia untuk Pemilu 2024. Detail program kerja yang lebih terfokus pada isu perlindungan tenaga kerja dan jaminan kesehatan mungkin akan diungkap lebih lanjut oleh masing-masing pasangan calon dalam debat kelima di minggu pertama Februari mendatang. Perkembangan terkait dengan program kerja ini penting untuk diamati oleh pemilih, mengingat pentingnya isu perlindungan tenaga kerja dan jaminan kesehatan dalam pembangunan sosial ekonomi negara.

### **Program Kerja Paslon dalam Konteks Ketenagakerjaan, Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial**

Untuk dapat menilai visi, misi, dan program kerja di atas, dibutuhkan adanya konteks dan pembanding. Oleh karena itu, poin-poin di bawah menggambarkan beberapa kondisi ketenagakerjaan, kemiskinan, dan perlindungan sosial pada lima tahun terakhir yang terkait dengan program kerja ketiga paslon tersebut.

1. Sektor Industri: Jumlah tenaga kerja di sektor industri Indonesia mencapai 19,34 juta orang pada tahun 2023, meningkat tipis sebesar 0,88% dari tahun 2022. Tahun 2020 mencatat jumlah terendah dalam rentang enam tahun terakhir, dengan hanya 17,48 juta pekerja sektor industri. Kenaikan jumlah pekerja ini juga diiringi dengan kenaikan upah sebesar 7,3% pada tahun 2023.

2. Sektor Pertanian: Sektor pertanian masih memegang porsi terbesar dalam menyediakan lapangan pekerjaan di Indonesia, meskipun jumlah pekerja yang mampu ditampung oleh sektor ini mengalami penurunan sebesar sembilan persen dari tahun 2009 hingga 2016. Sementara itu, bidang lain seperti industri, manufaktur, dan jasa mengalami pertumbuhan positif.
3. Penciptaan Lapangan Kerja: Dalam tiga tahun terakhir hingga 2018, rata-rata tercipta 2,1 juta lapangan kerja baru setiap tahun di Indonesia. Peningkatan ini dianggap cukup tinggi, namun masih dibutuhkan lebih banyak lapangan kerja untuk mempercepat pertumbuhan, terutama bagi anak muda yang masih mencari pekerjaan pertama.
4. Pengangguran: Perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 5,45%, menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja pada bulan tersebut tercatat sebanyak 146,62 juta orang, dengan peningkatan sebesar 2,61 juta orang dibanding Februari 2022. Sementara itu, pada Agustus 2023, TPT turun menjadi 5,32%, dengan total angkatan kerja mencapai 147,71 juta orang. Jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2023 adalah 7,86 juta orang, menurun sekitar 560 ribu orang atau 6,77% dibanding Agustus 2022. Setelah pandemi COVID-19, sektor ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hal ini terlihat dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan penambahan jumlah penduduk bekerja sebanyak 4,55 juta orang dalam satu tahun terakhir hingga 2022.
5. Bantuan Sosial: Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia menyiapkan dana sebesar Rp470 triliun untuk bantuan sosial. Dalam rangkaian program bantuan sosial tersebut, beberapa program utama termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan kuota penerima manfaat sebanyak 10 juta keluarga. Program lainnya adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang ditargetkan untuk 18,8 juta penerima, dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditujukan untuk 17,9 juta siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA sederajat. Informasi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan yang luas dan beragam kepada masyarakat yang

membutuhkan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial.

6. **Penurunan Angka Kemiskinan:** Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 9,36 persen dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022. Ini menandakan penurunan yang signifikan, dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sekitar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Penurunan ini sejalan dengan aktivitas ekonomi yang menguat, penurunan angka pengangguran, dan inflasi yang terkendali. Dalam upaya mengurangi kemiskinan, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk program-program sosial. Pada tahun 2023, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp562,6 triliun untuk manfaat langsung masyarakat, termasuk PKH dan Kartu Sembako.
7. **Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem:** Antara tahun 2015 hingga 2019, proporsi penduduk miskin ekstrem di Indonesia menurun dari 7,2% menjadi 3,7%. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan kenaikan kembali angka kemiskinan ekstrem menjadi 3,8%. Pada Maret 2021, angka ini naik hingga 4,00% (10,86 juta jiwa), tetapi kemudian menurun lagi menjadi 3,73% (10,18 juta jiwa) pada September 2021. Kondisi ini menunjukkan dampak signifikan dari pandemi terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, namun juga menunjukkan resiliensi dan pemulihan pasca-pandemi. Sejalan dengan itu, Bank Dunia melaporkan bahwa Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 19% pada tahun 2002 menjadi 1,5% pada tahun 2022.
8. **Perlindungan Tenaga Kerja:** Dari tahun 2019 hingga 2024, BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan kepesertaan. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan kepesertaan sebesar 9,1%, yang didorong oleh kerja sama strategis dengan pemerintah daerah dan provinsi, serta inisiatif seperti PERISAI untuk memperluas kepesertaan kepada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Selain itu, program ini juga melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan jumlah kepesertaan mencapai 544,5 ribu pada Desember 2019. Data mengenai perkembangan kepesertaan dari 2020 hingga 2024 tidak tersedia dalam sumber yang saya temukan, tetapi tren umum menunjukkan upaya

berkelanjutan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan dan manfaat perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia.

9. **Perlindungan Kesehatan:** Dari tahun 2019 hingga 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program JKN dengan target cakupan universal health coverage (UHC) sebesar 98% dari total penduduk pada tahun 2024. Per 1 September 2023, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah mencakup sekitar 94,60% dari total penduduk, yang setara dengan lebih dari 262,74 juta jiwa. Tingkat pemanfaatan layanan program JKN juga tinggi, dengan jumlah kunjungan peserta ke fasilitas pelayanan mencapai 502,8 juta pada tahun 2022. Untuk mencapai target UHC pada tahun 2024, jumlah penerima bantuan iuran JKN dari pemerintah yang sekarang sekitar 96 juta orang diupayakan meningkat menjadi 113 juta orang pada 2024.

Dalam menyikapi program kerja yang dijanjikan oleh para calon presiden RI pada Pemilu 2024, terutama dalam bidang ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan sosial, sangat penting bagi pemilih untuk mengadopsi pendekatan yang realistis dan kritis. Kita harus mengevaluasi sejauh mana rencana dan janji tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik Indonesia saat ini. Pertimbangan harus diberikan pada aspek kelayakan, keberlanjutan, dan dampak jangka panjang dari setiap program yang diusulkan. Memahami detil dan strategi di balik janji-janji ini akan membantu pemilih membuat keputusan yang lebih informatif dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, pemilih perlu mempertimbangkan track record dan kemampuan nyata calon dalam menangani isu-isu penting ini. Sebuah pemilihan yang didasari oleh pemahaman yang mendalam akan berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih efektif dan inklusif.



**8** DECENT WORK AND  
ECONOMIC GROWTH



**10** REDUCED  
INEQUALITIES



**Referensi:**

<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/30/10210181/menakar-visi-misi-ketenagakerjaan-anies-ganjar-prabowo>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/ini-program-lengkap-prabowo-gibran-yang-ditawarkan-di-2024>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231031/12/1709634/pengamat-berimasukan-soal-janji-capres-2024-atasi-pengangguran>

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Angka-Kemiskinan-Semakin-Turun>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/14475271/jokowi-teken-inpres-optimalisasi-jkn-targetkan-98-persen-penduduk-peserta>

<https://www.antaraneews.com/berita/1274855/kepesertaan-bpjamsostek-bertambah-91-persen-selama-2019>

ISSN 2808-2060

